

**PENERAPAN *GREEN BANKING* PADA KINERJA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA
(Studi Pada PT Bank Muamalat)**

Skripsi

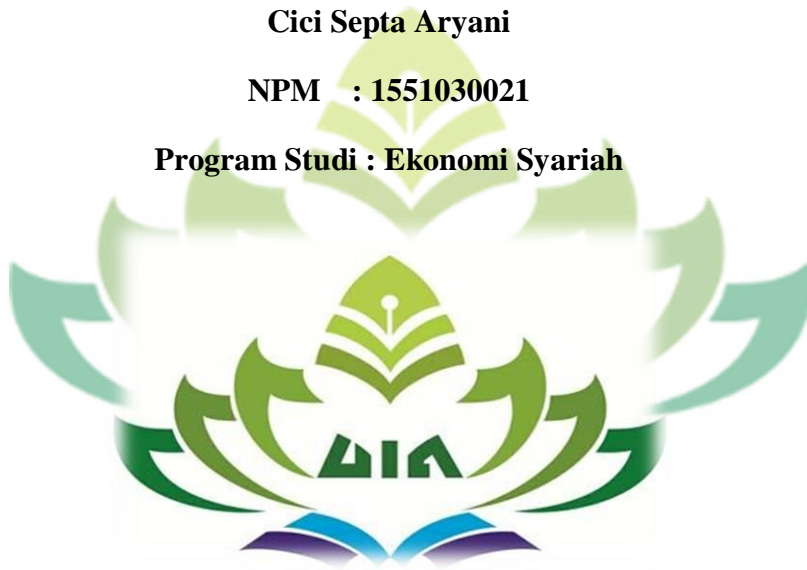
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarja Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Cici Septa Aryani

NPM : 1551030021

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**PENERAPAN *GREEN BANKING* PADA KINERJA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA
(Studi Pada PT Bank Muamalat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarja Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh :

Cici Septa Aryani
NPM : 1551030021

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M., Akt.

Pembimbing II : Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Penerapan *Green Banking* Pada Kinerja

PT Bank Muamalat

Tahun 2016-2018

Oleh

Cici Septa Aryani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *green* PBI dan surat Edaran BI 221 dan untuk mengetahui bagaimana implementasi *green banking* pada kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dan observasi. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *Green Banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan *green banking* pada kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018.

Program Bank Muamalat terdapat enam program yang diterapkan yaitu *green building*, pemanfaatan air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian dan penggunaan kertas serta meminimalisir resiko pemanasan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank muamalat Indonesia menjadi pioner yang mengadopsi konsep *green banking* dalam bisnisnya dan telah mengungkapkan informasi tentang *green banking* dalam laporan tahunan. Dalam hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *green banking* di Bank Muamalat Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Green Banking*, Kinerja, Bank Muamalat Indonesia



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan *Green Banking* Pada Kinerja Pt Bank Muamalat
Indonesia Tahun 2106-2018
Nama : Cici Septa Aryani
NPM : 1551030021
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE., MM. Akt.
NIP. 1953042319800031003

Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt.
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Phone : (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENERAPAN GREEN BANGKING PADA KINERJA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2016-2018"**

disusun oleh **Cici Septa Aryani NPM 1551030021**, Program Studi Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah), telah diujikan dalam sidang Munagasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
Pada Hari/tanggal : **Senin / 18 Mei Februari 2020**

Ketua : **Syamsul Hilal, M.Ag**

Sekretaris : **Ulul Azmi Mustofa, S.E.I, M.S.I**

Penguji I : **A. Zuliansyah, S.Si., MM**

Penguji II : **Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (أخرجه البخاري في كتاب المزارعة)

Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya “. (HR. Imam Bukhori)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Septa Aryani
NPM : 1551030021
Jurusan/Prodi : Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN GREEN BANKING PADA KINERJA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2016-2018** benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 13 Februari 2020

Penulis,

Cici Septa Aryani

PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugrah yang selama ini telah diberikan kepada saya dan saudara-saudara muslim saya. Dalam mengerjakan skripsi ini bukanlah tugas yang berat bagi penulis untuk dipelajari dalam hidup ini, karena masih banyak sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya, sehingga membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan ikhlas dan tulis penulis dapat menamatkan observasi ini, yang kemudian observasi ini penulis didekasikepada :

1. Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala petunjuk dan pertolongan nya, senantiasa memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi was sallam* yang sangat saya kagumi.
3. Kedua orang tua ku Bapak Ace dan Ibu Iis Maryana yang senantiasa memeberikan dukungan baik secara materi maupun moral, tidak berhenti mendoa'akanku, menyayangi penuh cinta, sehingga skripsi ini dapat selesai. Serta adik ku Alqusa revaldo saputra yang selalu memberikan semangat kepadaku.
4. Kedua Kakak ku Wahyu Galuh Permana, S.pd dan Yunita Elfa Riski, S.E yang memberikan banyak ide-ide dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan ku semangat.
5. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah B yang sama-sama berjuang dan menyayangi satu sama lain dalam proses penulisan skripsi.
6. Almamaterku tercinta, UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cici Septa Aryani. Lahir di Mutar Alam, 13 September 1998. Penulis anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ace dan Ibu Iis Maryana. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut :

1. Pendidikan pertama dimulai di SD Negeri Tanjung Raya di Way Tenong, Lampung Barat pada tahun 2003-2009;
2. Kemudian SMP Negeri 1 Way Tenong pada tahun 2009-2012;
3. Kemudian SMA Negeri 1 Way Tenong pada tahun 2012-2015;
4. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di jurusan Ekonomi syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan *Green Banking* Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (SI) pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sholawat serta salam disampaikan Kepada Tuladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta Para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya yang kita nantikan syafaat-Nya dihari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengayomi penulis.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM. Akt selaku Pembimbing Akademik satu yang dengan tulus, ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak.,Akt , selaku Pembimbing Akademik satu yang dengan tulus, ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada kami selama di bangku perkuliahan
6. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya kelas B dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermamfaat bagi kita semua.



Bandar Lampung, 6 Maret 2020

Cici Septa Aryani

NPM. 1551030021

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN BIMBINGAN..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Pembatasan Masalah..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Kegunaan Penelitian | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 11 |
| A. Legitimacy Theory | 11 |
| B. Stakeholders Theory | 12 |
| C. Shari'ah Enterprise Theory | 15 |
| D. Green Banking | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Green Banking..... | 16 |
| 2. Prinsip Green Banking..... | 20 |
| 3. Indikator Green Banking | 22 |
| 4. Manfaat Green Banking..... | 26 |
| 5. Penerapan Green Banking dalam Hukum Perkreditan | 26 |
| 6. Peranan Bank dalam Pelaksanaan Green Banking dalam Hukum Perkreditan | 31 |
| 7. Perlunya Perbankan Nasional Pada Green Banking..... | 33 |
| E. Kinerja Pegawai | 34 |
| F. Bank Syariah..... | 37 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 37 |
| 2. Tujuan Bank Syariah | 41 |
| 3. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah | 42 |
| 4. Bank Muamalat Indonesia | 44 |
| G. Penelitian Yang Relevan..... | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 51 |
| A. Jenis Penelitian..... | 51 |
| B. Data dan Sumber Data | 51 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 52 |
| 1. Observasi | 52 |
| 2. Dokumentasi..... | 52 |
| D. Analisis Data..... | 52 |
| 1. Reduksi Data..... | 53 |
| 2. Penyajian Data..... | 53 |
| 3. Penarikan Kesimpulan..... | 54 |
| E. Uji Keabsahan Data | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Konsep <i>Green Banking</i> dalam PBI dan Edaran Surat BI | 56 |
| B. Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia | 57 |

| | |
|--|----|
| 1. Efisiensi Pemanfaatn Energi..... | 60 |
| 2. Efisiensi Pemakaian Air | 61 |
| 3. Pengelolaan dan Pengurangan Limbah..... | 63 |
| 4. Efisisensi Pemanfaatan Kertas..... | 65 |
| 5. Green Building | 66 |
| C. Pembahasan..... | 67 |

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 4.1 | Konsumsi Energi..... | 61 |
| Tabel 4.2 | Volume Penggunaan Air | 62 |
| Tabel 4.3 | Pengelolaan dan Pengurangan Limbah | 63 |
| Tabel 4.4` | Penggunaan Kertas..... | 65 |
| Tabel 4.5 | Penerapan Green Banking Bank Muamalat Indonesia | 69 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat dan tidak terkontrol seringkali menyebabkan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup. Walaupun penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan, namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup karena dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Perlindungan lingkungan dari cuaca ekstrim, perubahan iklim maupun degradasi lingkungan akibat faktor kesengajaan/ ketidaksengajaan manusia dalam beraktivitas merupakan bentuk tantangan global yang tergolong terpenting untuk dihadapi dan ditindaklanjuti segera oleh seluruh warga dunia termasuk warga korporasi yang memegang peran penting dalam hal ini.

Isu-isu lingkungan tersebut terus menjadi perhatian banyak perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia. Hancurnya lingkungan dan ekosistem Indonesia dapat disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat, pegawai pemerintah, dan pelaku usaha mengenai definisi lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakomodasi instrumen ekonomi lingkungan agar menjadi pertimbangan dalam konteks ekonomi. Kerusakan lingkungan yang sering terjadi tidak lepas dari campur tangan manusia, dimana kerusakan ini banyak ditimbulkan dari kegiatan usaha manusia dalam rangka memperoleh keuntungan. Sumber daya lingkungan seperti udara, air, lahan dan biota, dapat menyediakan barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat ekonomis. Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *Green Banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS. Saat ini isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan menjadi trending topik dalam pertemuan-pertemuan internasional antar negara sehingga kehadiran institusi-institusi yang ramah lingkungan dalam operasionalnya sangat diharapkan bahkan sangat diharuskan. Apalagi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang emisi karbonnya tergolong tinggi.

Kehadiran green banking di Indonesia menjadi potensial dan penting untuk ikut serta melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi karbon Indonesia.

Saat ini sedang disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintahnya. Salah satu instrumen tersebut berkaitan dengan Sistem Lembaga Keuangan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, berkelanjutan bisnis perbankan juga merupakan hubungan sebab-akibat antara perilaku bisnis dan lingkungan.

Sebagai motor penggerak roda perekonomian negara, perbankan dalam era perubahan iklim layak memberikan kontribusi optimal. Perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan. Sektor keuangan dan perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari pencemaran lingkungan, walaupun tidak secara langsung menyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi karena tingkat penggunaan energi, pembuangan limbah, dan kegiatan lainnya pun cenderung lebih rendah dibanding sektor lainnya.

Bagaimanapun juga, memelihara kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sektor keuangan dan perbankan, yang juga dituntut untuk senantiasa mengontrol dan mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Menurut Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia, Irwan Lubis mengatakan, peran perbankan dalam penyediaan pembiayaan atau kredit berbasis kepentingan lingkungan masih minim. Pentingnya peranan

perbankan pada hal ini didasarkan pada fakta penyaluran kredit perbankan pada sektor hulu serta infrastruktur yang memberikan efek lebih tinggi bagi perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Di Indonesia, konsep *green banking* mendapat perhatian yang luas dalam beberapa tahun terakhir. *Green Banking* diartikan sebagai perbankan yang di dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sustainability development. Terutama dalam kredit maupun pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, dan serta pembangunan sosial budaya masyarakat. Penerapan konsep green banking diperluas, dari sebelumnya hanya diterapkan di sektor perbankan, diperluas menjadi ke seluruh lembaga jasa keuangan.

Pengembangan *green banking* memerlukan peran perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat lebih berfokus pada pemberian pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, mengarah ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima masyarakat, serta tidak menghasilkan produk yang berbahaya bagi lingkungan. Perbankan asing dan perbankan negara-negara tetangga telah banyak melaksanakan *green banking*, bahkan mereka telah memasukkannya ke dalam laporan tahunan.

Sementara itu, bagi perbankan nasional, penerapan *green banking* masih bersifat *voluntary*. Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 60 :

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ﴾

Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing), makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dari surat Al Baqarah ayat 60 menjelaskan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan lingkungan hidup di seluruh dunia, kebakaran hutan, polusi, dan kerusakan lainnya menyebabkan bencana alam yang serius di seluruh dunia. Bencana tersebut akan berimbas pada kegiatan social ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Disadari bahwa isu pencemaran lingkungan tidak terlepas dari peran perbankan dan lembaga keuangan non bank yang membiayai debitur atau berinvestasi di sektor usaha yang sensitif terhadap lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa selain menjadi solusi terkait permasalahan pengelolaan lingkungan, *sustainable financing* juga diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing jasa keuangan bank dan jasa keuangan non bank nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan bisnis perbankan juga merupakan hubungan sebab-akibat antara perilaku bisnis dan lingkungan.

Sebagai motor penggerak roda perekonomian negara, perbankan dalam era perubahan iklim layak memberikan kontribusi optimal. Perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan. Bagaimanapun juga, memelihara kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sektor keuangan dan perbankan, yang juga dituntut untuk senantiasa mengontrol dan mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan bisnisnya.

Perbankan syariah saat ini sebagian kecil hanya mengimplementasikan model bisnis *green banking business* terbatas pada program CSR (*corporate sosial responsibility*) saja namun belum diterapkan dengan baik pada *core business competence*. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti, apakah bank syariah saat ini telah menerapkan *green banking*. Di Indonesia, konsep *green banking* mendapat perhatian yang luas dalam beberapa tahun terakhir.

Upaya *green banking* perbankan syariah sejalan dengan ajaran islam yang memiliki spirit dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Penerapan *green banking business* yang masih baru terutama implementasinya di perbankan syariah, maka masih perlu dilakukan perbaikan dari berbagai sisi permasalahan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan delapan lembaga jasa keuangan perbankan telah berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam pembiayaan proyek hijau atau *green banking*.

Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan green banking pilot project oleh delapan perbankan yaitu Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI syariah, BJB dan Bank Artha Graha Internasional. Pengembangan green banking memerlukan peran perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat lebih berfokus pada pemberian pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, mengarah ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima masyarakat, serta tidak menghasilkan produk yang berbahaya bagi lingkungan.

Penerapan green banking business yang masih baru terutama implementasinya di perbankan syariah, maka masih perlu dilakukan perbaikan dari berbagai sisi permasalahan. Sudah banyak bank yang ada di Indonesia menerapkan *green banking* demi kemajuan bank dalam melestarikan lingkungan. Dalam hal ini banyak sekali bank syariah yang telah menerapkan *green banking* dalam program kerjanya.

PT. Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan observasi dengan mencari data mengenai Bank Muamalat Indonesia. Karena Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang baru beberapa tahun melaksanakan program *green banking*.

Sehingga peneliti menarik untuk meneliti di Bank Muamalat Indonesia apakah program tersebut berjalan dengan baik. Model bisnis *green banking*

merupakan salah satu interpretasi dari kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, sudah saatnya bank benar-benar peduli pada lingkungan dan masyarakat. Melihat berbagai latar belakang diatas dalam kaitannya perlu adanya penelitian maka penelitian ini akan terfokus pada judul **“Penerapan *Green Banking* Pada Kinerja PT Bank Muamalat Tahun 2016-2018”**.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan *green banking* di perbankan syariah. Subfokus penelitian adalah *Green Coin Rating* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018 karena program tersebut baru berjalan 3 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *green PBI* dan surat edaran BI 221 ?
2. “Bagaimana implementasi *green banking* pada kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018?”

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan

tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada :

1. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018 sebagai pegiat ekonomi dalam rangka mendorong sistem *green banking*.
2. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemaknaan *green banking* dari penyalur dana untuk lebih menunjang implementasi perbankan hijau dalam setiap kegiatan Bank Muamalat Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *green* PBI dan surat Edaran BI 221.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *green banking* pada kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018.

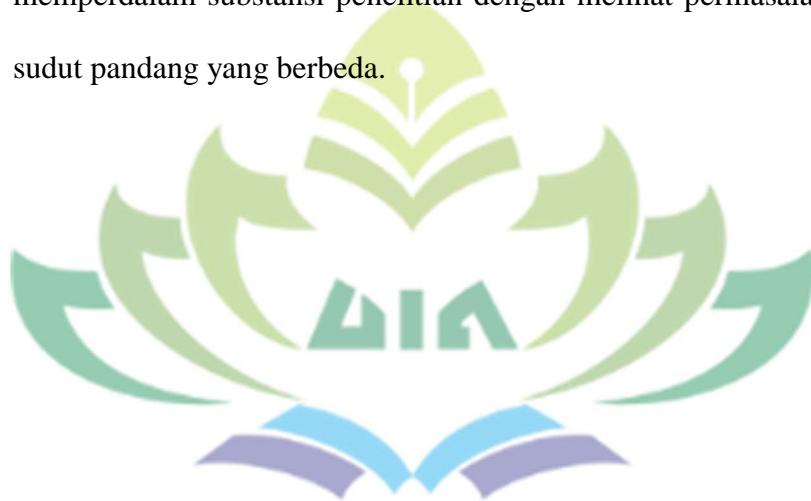
F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya model bisnis *green banking* di PT. Bank Muamalat Indonesia.
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya model bisnis *green banking* di PT. Bank Muamalat Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akutansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya model bisnis *green banking* di PT. Bank Muamalat Indonesia.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Ghazali dan Chariri menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.¹

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan dalam buku Hadi berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.² Menurut Gray et.al, dalam buku Hadi menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada

¹Andi Nuraeni, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting*, JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)-Volume 4, No.1, Januari-Juni 2019, h. 79

²Omi Pramiana, dkk, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*, Jurnal EKSIS: Volume 13 No 2, Oktober 2018, 172-182

keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif (Dowling dan Pfeffer):³

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi dan dialog dengan public.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR.

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori legitimasi menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat memberi cost dan benefits untuk keberlanjutan korporas.

B. Stakeholders Theory

Menurut Freeman dan Mcvea dalam Kurniawansyah mendefinisikan stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder Stakeholders

³Farida Efriyanti, dkk, *Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT.Bank Negara Indonesia*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Volume 3, Nomor 2, September 2012, h. 272

merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).⁴ Theory (Teori Stakeholder), mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders.

Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya.⁵ Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.⁶ Semakin *powerful stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Semakin kuat posisi stakeholders, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholdersnya. Menurut Thomas dan Andrew, dalam Nor Hadi, Stakeholders Theory memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:⁷

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.

⁴Andi Nuraeni, *Op.Cit.* h. 79

⁵Farida Efriyanti, dkk, *Ibid.*

⁶Yunus Handoko, Implementasi *Social and Environmental Disclosure* dalam Perspektif Teoritis, *Jurnal JIBEKA*, Vol.8 No.2, (2014), h.74

⁷*Ibid.*

2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan stakeholdersnya.
3. Kepentingan seluruh legitimasi stakeholders memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

Teori stakeholder menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan stakeholders. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke stakeholders. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR.

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder mereka. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya (pemegang saham) kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat analis dan pihak lain).

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi sehingga diharapkan akan menimbulkan hubungan yang

harmonis antara perusahaan dan stakeholder. Hubungan yang harmonis otomatis akan menciptakan sebuah sustainability atau kelestarian perusahaan.

Semakin baik pengungkapan CSR dilakukan oleh perusahaan maka stakeholder akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan perusahaan.

C. Shari'ah Enterprise Theory

Shari'ah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari enterprise theory sebelumnya.⁸ Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep Shari'ah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah.

Haryadi menyatakan bahwa pihak yang menerima pendistribusian nilai tambah dalam teori ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni direct participants dan indirect participant. Direct participants adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan sedangkan indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan. Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi).

⁸Rahmah Yulisa Kalbarini, Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah, JESTT Vol. 1 No. 7 Juli 2014, h. 508

Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia adalah:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (*direct*, *in-direct*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders.
3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholders.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

D. Green Banking

1. Pengertian Green Banking

Green Banking atau perbankan hijau merupakan konsep atau paradigma baru dalam industri perbankan internasional yang sedang berkembang selama satu dekade terakhir. *Green Banking* atau perbankan ramah lingkungan merupakan konsep atau paradigm baru dalam industry

perbankan internasional yang bekerja selama satu decade terakhir.⁹ Konsep tersebut muncul sebagai respons atas tuntutan masyarakat global yang meminta industri perbankan turut berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang kian serius.

Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab secara keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*). Program perbankan berbasis lingkungan lainnya yang diterapkan oleh Bank Indonesia tertuang dalam program *green banking*. *Green Banking* untuk mewujudkan aksi nyata dalam pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh perseroan sendiri (termasuk keterlibatan pegawai) maupun bermitra dengan komunitas masyarakat termasuk LSM.

Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.¹⁰ Masukujjaman & Aktar mengemukakan bahwa *green banking* adalah bank yang ramah lingkungan (*eco-friendly*) untuk menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi menjadi tempat tinggal yang

⁹Andreas Lako. *Green Economy*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Prataman), h. 94

¹⁰Lilik Handajani, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN*, Jurnal *Economia*, Vol. 15, No. 1 April 2019, h.2

layak huni (*habitable*) melalui penyediaan produk perbankan hijau (*green product*) yang inovatif untuk mendukung inisiatif bank hijau.¹¹ *Green Banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa green banking adalah suatu kegiatan yang dilakukan bank dalam operasional agar lebih bertanggungjawab dalam menjalankan suatu bisnis. Pada pemahaman ini *Green Banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature*, *well-being*, *economy* dan *society*.¹² Bank yang “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah output berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, *corporate identity* dan *brand image* yang kuat serta pencapaian target bisnis yang seimbang.

Perbankan dapat menjadi suatu kekuatan baru dalam membangun gerakan *go-green*. Peran dunia perbankan sebagai jembatan investor maupun *stakeholder* perusahaan menjadikan perbankan sebagai alat untuk mengembangkan regulasi-regulasi baru yang bersifat *go-green* dengan tidak menghilangkan fokus terhadap pasar (*market oriented*). Adanya implementasi model bisnis *green banking* ini kegiatan perbankan pada

¹¹*Ibid.*

¹²Suryaman, dkk, *Peran Dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking (Studi Pada Bank Bjb)*, Prosiding Sentia 2016 – Politeknik Negeri Malang Volume 8, h. 36

umumnya tidak akan terganggu, sebaliknya akan memberikan keuntungan baik *tangible* maupun *intangible*.

Prinsip *sustainable development* memastikan pembangunan yang dilakukan harus memiliki keseimbangan pada tiga sudut pandang yaitu *profit* (perekonomian), *people* (sosial), dan *planet* (ramah lingkungan).¹³ Perbankan asing sekarang telah banyak menganut prinsip Green Banking dan telah memasukkan pada laporan tahunan mereka sedangkan, perbankan Indonesia masih menerapkan *Green Banking* yang bersifat sukarela karena belum adanya mandat langsung dari pemerintah. Bank yang telah mendeklarasikan diri sebagai *Green Banking* seharusnya dapat mengimplementasikannya tidak hanya terbatas pada program CSR (*Corporate Social Responsibility*) saja namun harus diterapkan dengan baik dan matang pada *Core Business Competence*-nya, sehingga *Green Banking* tidak hanya menjadi sebagai sebuah slogan.

Perbankan memiliki potensi yang tinggi sebagai role model bagi industri lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip Sustainable Development. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Bank Indonesia (BI) sepakat berkoordinasi untuk menerapkan "*Green Banking*", yakni peningkatan peran sektor perbankan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesepakatan ini dilatarbelakangi meningkatnya kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan berbagai industri, termasuk industri perbankan.

¹³Andi Nurul Fadhillah Ayu dan Maria Anityasari, "*Analisis Implementasi Green Banking pada PT. Bank X (Persero) Tbk*", Jurnal Teknik Pomit Vol. 1, No. 1, 2013 h. 1

Produk *green banking* membantu menciptakan solusi berbasis pasar yang efektif dan menjangkau jauh bagi pelanggan. Bank sedang mengembangkan produk dan layanan baru yang menanggapi permintaan konsumen untuk pilihan berkelanjutan. Cakupan produk perbankan hijau meliputi: Hipotek hijau Pinjaman hijau.

Kartu kredit rekening hijau Green CD Pasar uang hijau Perbankan mobile Perbankan online Strategi Perbankan Hijau Strategi perbankan hijau yang dikembangkan adalah sebagai berikut: Terlibat dengan para pemangku kepentingan utama dan ciptakan kesadaran akan masalah lingkungan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat juga, jelaskan kepada mereka nilai bisnis dan lingkungan serta perlunya menghijaukan proses, produk, dan layanan bank. Melakukan audit energi dan meninjau kebijakan pembelian dan pembuangan peralatan dan praktiknya. Menilai dampak lingkungan dan biaya TI dan mengidentifikasi area yang akan "dihijaukan".

2. Prinsip *Green Banking*

Prinsip dasar green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk eco-label. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya

yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Menurut World Bank *green banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya.

Pada pemahaman ini *green banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature*, *well being*, *economy*, dan *society*. Bank “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Mereka telah memperkenalkan standar peringkat hijau untuk bank-bank India, yang disebut sebagai 'Peringkat Koin Hijau'.

Di bawah sistem peringkat ini, bank dinilai berdasarkan emisi karbon dari operasi mereka dan berdasarkan jumlah daur ulang, perbaikan dan penggunaan kembali bahan yang digunakan dalam perabot bangunan mereka dan dalam sistem yang mereka gunakan server, komputer, printer, jaringan, dan lain-lain. Mereka juga dinilai berdasarkan jumlah proyek hijau yang dibiayai oleh mereka dan penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada mereka peminjam untuk mengubah bisnis mereka lebih hijau.



Source: Institute of Development and Research in Banking Technology, 2013

3. Indikator *Green Banking*

Menurut jurnal Vikas Nath, Nitin Nayak dan Ankit Goel dalam Jurnal Internasional *Green Banking Practice* mengatakan bahwasanya ada indikator dalam penentuan Perbankan hijau. Dimana dimuat dalam sebuah konsep yaitu *Green Coin Rating* (GCR) atau Peringkat koin Hijau. Dimana Indikator dari GCR ada 6 yaitu :

a. *Carbon Emisi*

Carbon Emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, luar , mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin meliputi bahan bakar. Pemakaian listrik dan sebagainya. Emisi karbon ini berasal dari aktivitas yang mengeluarkan gas seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer, gas ini juga yang dikenal dengan sebutan gas rumah hijau, mengubah

lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk karena perubahan iklim.

Dalam hal ini diharapkan perusahaan ataupun bank dapat menggunakan teknologi dengan karbon rendah seperti pemakaian lampu dengan lampu pijar, membuat dinding gedung dengan kedap cuaca, penggunaan elektronik dengan bijak hingga mempertimbangan energi alternatif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara agar lingkungan menjadi lebih bersih.

b. Green Rewards

Green Rewards adalah bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem didalamnya. Adapun macam - macam *green rewards* dalam perusahaan ini meliputi, penghargaan atau *award* dalam menjaga ataupun berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan, sertifikasi dan sebagainya.

c. Green Building

Green Building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan dan penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat minim. Dimana maksud dari *green buildings* ini

adalah dengan pemanfaatan bahan – bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan- sentuhan yang mencirikan tentang alam seperti pemberian bunga atau tanaman ditembok serta pemakaian listrik atau tata *lay out* ruangan yang menggunakan material alam. adapun konsepnya meliputi pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi energi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian dan renovasi bangunan.

d. Reuse/Recycle/Refurbish

Reuse/Recycle/Refurbish adalah konsep dimana menggunakan, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksud dari indikator ini adalah penggunaan barang – barang yang sudah tidak berguna untuk dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik diluar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti penggunaan kertas kembali menjadi 2 sisi dengan harapan tidak menggunakan kertas baru dan mengurangi pemakaian kertas atau barang lainnya yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas sehari – hari.

e. Paper Work atau Paperless

Paper Work atau *Paperless* adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan jaman dan tuntutan dari segala bidang. Dengan pengurangan kertas ini diharapkan perusahaan dan semua lini bisa

menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dikarenakan kertas sendiri terbuat dari serat pohon yang dimana butuh waktu lama hingga bertahun – tahun untuk dapat tumbuh pohon tersebut. Didalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi biasa digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan. konsep ini meliputi, penggunaan *smartphone* pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya.

f. Green Investment

Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), Implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. *Green investment* meliputi, Penggunaan input material ramah lingkungan, intensitas material input rendah, penerapan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Recovery*) Intensitas energi rendah, SDM memiliki wawasan lingkungan, teknologi berkarbon rendah dan penggunaan energi alternatif. Adapun cara penghitungan dari konsep *green banking* ini memiliki rumus Green Banking sama dengan Total dari seluruh Bank Umum syariah di Indonesia yang menerapkan *Green Banking* dibagi dengan indikator *Green Banking* lalu dikali dengan seratus persen.

4. Manfaat *Green Banking*

Upaya-upaya untuk menjadi *green banking* memang akan menimbulkan *cost* yang besar dan sejumlah konsekuensi lainnya bagi bank. Namun, sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa dalam jangka panjang upaya-upaya tersebut bakal mendatangkan manfaat berlimpah bagi bank adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Meningkatkan efisiensi dan menjamin pertumbuhan ekonomi bank secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan harmonisasi antara bank dan para pemangku kepentingan serta memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah setempat serta terjaga kelestarian lingkungan alam.
- c. Bank dan nasabah/masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang hijau, nyaman, dan kondusif.
- d. Reputasi dan citra bank meningkat sehingga berimplikasi pada apresiasi dan pengakuan masyarakat luas. Hal tersebut berdampak meningkatkan pangsa pasar bank.
- e. Dedikasi dan produktivitas karyawan meningkat.

5. Penerapan Green Banking dalam Hukum Perkreditan

Pemberian kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya badan-badan atau lembaga-

¹⁴Rouf Ibnu Mu'thi, *Green Banking*, (Jakarta: Kompasiana: 2012), h. 76.

lembaga keuangan yang memberikan kredit dapat digerakkan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena perusahaan yang ingin berkembang tergantung pada fasilitas kredit. Sebagai salah satu pemberi dana.

Bank tidak saja hanya melihat pertimbangan ekonomisnya, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya.¹⁵ Dengan demikian perbankan tidak ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem. Pada sistem perbankan, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan mengeliminisasikan resiko-resiko dalam pemberian kreditnya kepada nasabah debitur.

Bank (kreditur) dalam memberikan kredit kepada debitur selalu memakai perjanjian kredit, dalam arti dibuat secara tertulis (kontrak). Meskipun secara tegas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur bahwa setiap transaksi kredit harus memakai perjanjian tertulis. Menurut isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersangkutan (debitur dan kreditur) merupakan hukum positif bagi yang bersangkutan, dimana untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat materiel dan formal.

Salah satu manifestasi dari isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian kredit sering disebutkan sebagai kebebasan berkontrak artinya apa yang akan dicantumkan dalam perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak.

¹⁵Nicholas F. Maramis, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, h. 108

Namun demikian, meskipun isi perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih banyak ditentukan oleh bank sendiri, artinya debitur tidak diberi kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut. Dari substansi perjanjian kredit tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kedudukan bank (kreditur) lebih kuat dibanding debitur, sehingga pihak bank dapat memaksakan kepada debitur agar menurut dan mematuhi dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya.

Hal ini dilakukan agar kepentingan bank tetap terlindungi, dan bank tidak dirugikan seandainya terjadi wanprestasi dari pihak debitur dikemudian hari. Oleh karena pihak bank secara ekonomis berada pada pihak yang kuat, maka “kekuatan” yang dimiliki oleh bank dapat dipergunakan untuk memaksakan kepada pihak debitur dalam membuat perjanjian kredit dengan memasukkan klausula-klausula pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh debitur dalam menjalankan usahanya atau secara umum dimasukkan klausul-klausul lingkungan hidup (*environmental provisions*). Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya sekedar pelengkap isi perjanjian kredit, tetapi juga harus disertai dengan pihak instansi terkait yang mengawasi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup, artinya harus ada tindak lanjut dan kerjasama dengan pihak lain yang diberi tugas untuk mengawasi masalah lingkungan hidup, dengan kata lain bahwa klausul-klausul tersebut harus dilaksanakan/ditegakkan atau diterapkan

sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud dan tujuan dicantumkannya klausul-klausul tersebut.

Klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam perjanjian kredit yang dicantumkan sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat kita lihat di Amerika Serikat, dimana klausul-klausul yang harus ada dicantumkan dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban debitur untuk memelihara lingkungan hidup antara lain:

- a. Bersedia membayar biaya audit awal lingkungan dan tahunan yang memenuhi syarat terlampir, seperti yang tertera dalam kebijakan kreditur (pemberi pinjaman) tentang lingkungan, sebagai tanda jadi...., dan
- b. Mengizinkan pihak bank dan agen-agenya untuk memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan.

Selanjutnya perjanjian tersebut memuat *covenant* sebagai berikut :

- a. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup
- b. Tidak berhubungan dengan zat-zat berbahaya ataupun beracun tanpa memenuhi standar kelayakan pakai dan sepengetahuan pihak kreditur;
- c. Bersedia membayar biaya pembersihan, jika dikehendaki oleh undangundang atau peraturan-peraturan setempat;
- d. Secepat mungkin memberitahu pihak kreditur jika terdapat masalahmasalah yang menyangkut lingkungan.

Ketentuan-ketentuan lain yang dicantumkan dalam perjanjian kredit antara lain:¹⁶

- a. Segala pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah dilakukan oleh pihak debitur dan arealnya telah dinyatakan bebas dari zat-zat berbahaya serta tidak ada bagian-bagian yang merupakan daerah rawan gangguan lingkungan;
- b. Tidak ditemui zat-zat berbahaya atau beracun di areal milik debitur;
- c. Debitur tidak pernah melanggar segala peraturan atau undang-undang lingkungan dimasa yang lalu maupun sekarang;
- d. Debitur tidak pernah disebut oleh lembaga lingkungan pemerintah setempat sebagai pelaku atas tindakan makar atau pelanggaran hukum atau semacamnya;
- e. Debitur tidak pernah membuang segala macam zat atau benda berbahaya yang melanggar peraturan atau undang-undang lingkungan;
- f. Debitur tidak pernah menyangkut segala macam zat yang berbahaya.

Dalam penilaian bank, bidang usaha nasabah (debitur) yang mempunyai potensi untuk mencemarkan lingkungan hidup dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit. Dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain :

- a. Jika perusahaan debitur mencemarkan lingkungan, ada kemungkinan usahanya ditutup oleh pemerintah, jika hal ini terjadi sudah tentu sangat

¹⁶*Ibid.*

merugikan bank, dan debitur ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan pinjamannya (menghindari resiko).

- b. Sebagai upaya keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan hidup (green banking).

6. Peranan Bank dalam Pelaksanaan Green Banking dalam Hukum Perkreditan

Lingkungan hidup secara ekologis tidak mengenal batas wilayah administratif, batas institusi, ataupun batas ras, suku, agama ataupun golongan. Termasuk di dalamnya dunia perbankan. Dalam rangka investasi untuk pendirian industri dilakukan studi kelayakan baik aspek ekonomi, teknik dan lingkungan.

Meskipun dari sisi kelayakan ekonomi dan teknik telah terpenuhi, namun apabila kelayakan lingkungan tidak terpenuhi maka investor atau bank tidak akan mengucurkan dana bagi keperluan investasi. Terkait dengan hal dimaksud, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktivitas Bank Umum, yang mengatur bahwa penilaian terhadap prospek usaha sebagai unsur kualitas kredit, meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Pada Pasal 10 mengenai Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut :¹⁷

- a. Prospek Usaha

¹⁷*Ibid.* h. 113

- b. kinerja (performance) debitur; dan c
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Peranan bank dalam penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Keberadaan perbankan diperlukan untuk menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan yang bersifat transaksi pemberian kredit untuk sektor industri. Sebaliknya kegiatan operasional perbankan dipengaruhi pula oleh maju mundurnya suatu kegiatan ekonomi, misalnya sektor industri.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain feasibility study, viability, sertaprofitability atas dasar repayment capacity. Tujuannya adalah untuk

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁸

7. Perlunya Perbankan Nasional Pada *Green Banking*

Beberapa alasan menurut Lako mengenai perlunya korporasi perbankan nasional untuk segera merespon dan mengaplikasikan konsep *green banking*.

- a. Korporasi perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung terwujudnya visi dan tujuan pembangunan nasional. Sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran strategis, perbankan memiliki peran krusial untuk turut mendorong atau bahkan “memaksa” para debitor yang mengajukan kredit agar lebih ramah terhadap isu – isu *green economy* dan *green business* dalam pengelolaan bisnis atau usahanya.
- b. Sebagai entitas ekonomi dan sosial, korporasi perbankan juga harus berperan aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan gerakan *green economy* serta *green business* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebelum berusaha menghijaukan para debitor dan sistem keuangan perbankan, para pelaku perbankan (dan industri keuangan lainnya) harus menghijaukan terlebih dahulu sistem kelola korporasi perbankan serta proses

¹⁸*Ibid.* h.114

bisnisnya secara benar berdasarkan prinsip – prinsip *green banking* dan *sustainable business*.

- c. *Green banking* sedang mendapat perhatian luar dari kalangan pelaku industri perbankan dan keuangan internasional. Bank dunia, IMF, UNEP, lembaga keuangan dan sejumlah bank sentral di berbagai negara sedang berupaya mendesain sistem *green banking* dalam industri keuangan. Tujuannya adalah untuk menghidupkan industri perbankan serta mendukung gerakan *green economy* dan *green business* pada level negara korporasi.

E. Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi tingkat faktor di atas, maka semakin besarlah kinerja pegawai.¹⁹ Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.²⁰

¹⁹Nel Arianty, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*, Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 14 No. 02 Oktober 2014, h. 144

²⁰Rita J. D. Atarwaman, *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon*, Jurnal Sosoq Volume 4 Nomor 2, Agustus 2015, h. 24

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.²¹ Jadi kinerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang sudah tercapai sesuai dengan tanggung jawab dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya dengan memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.

Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatankegiatan utama dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan dan lain-lain. Masalah-masalah empiris yang terdapat dan menyangkut dengan kinerja pegawai, diantaranya adalah

²¹Riski Damayanti, at.al. *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan Non Medis RS Islam Siti Khadijah Palembang)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan Tahun XV No 2, Oktober 2018, h. 76

kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan belum memuaskan. Hal ini terlihat dari masih adanya sebagian pegawai yang masih bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka juga banyaknya pekerjaan yang menumpuk yang belum bisa diselesaikan pada waktunya.

Permasalahan yang menyangkut kemampuan pegawai harus segera diselesaikan dengan baik. Keterbatasan pegawai yang handal, yang menguasai operasional merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insani akan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional.

Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan demi kelangsungan hidup organisasi suatu perusahaan. Dalam mencapai suatu kinerja yang tinggi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi kinerja karyawan terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan karakteristik kelompok kerja sedangkan faktor eksternal antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar.²²

Peningkatan pengetahuan, keahlian, perubahan sikap, perilaku, serta koreksi terhadap kekurangan-kekurangan kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui motivasi, pengembangan, kondisi lingkungan kerja, sistem penghargaan, kepuasan kerja, perilaku

²²Achmad Budiono, *at.al. Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Keuangan Kodam IV Diponegoro Yang Berkedudukan di Semarang*, Journal Of Management Vol.2 No.2 , Maret 2016, h. 5

karyawan, dan gaya kepemimpinan. Sistem penilaian kinerja karyawan ini merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya yang mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, mengendalikan perilaku karyawan, termasuk tingkat ketidakhadiran, hasil kerja, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi, dan penempatan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.²³

F. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam.

Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

²³Agustinus Setyawan, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Tiga Perusahaan Fabrikasi Lepas Pantai Di Batam Dan Karimun)*, Journal Of Accounting & Management Innovation, Vol.2 No.1, January 2018, h. 68

syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktekpraktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatankegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.

Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syari'ah didirikan. Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik.

Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Perkembangan institusi

keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank Syariah adalah bank umum maupun bank perkreditan rakyat di dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau sesuai aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada Al Quran, Hadits, Ijma para sahabat dan Qiyas Ulama. Sejak tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (m) UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 13 huruf (c) UU No. 10 Tahun 1998 dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya baik untuk Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Kegiatan pembiayaan bagi hasil oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian di dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun

2004, telah memberikan landasan hukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip syariah, melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap perbankan berdasar prinsip syariah. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa: Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan /atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai

seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis.

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:³⁶

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

3. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari bank syariah:²⁴

a. Keunggulan dan Kelebihan Bank Syariah

Menurut Antonio menjelaskan tentang :

- 1) Kelebihan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

²⁴Agus Marimin, *at. al.* PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, h. 79-80

- 2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
- 3) Adanya Fasilitas pembiayaan (Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- 4) Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- 5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Kelemahan Bank Syariah

John L. Eposito mengkritisi Ekonomi Islam dalam bahwa: Secara keseluruhan, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan Ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan system lain dari pada menunjukan (bahwa Ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik. Menurut Adiwarmanto dalam Sulistiyawan menyatakan bahwa ada enam kelemahan Bank Syariah yang menyebabkan masih sedikitnya

masyarakat menjadi nasabah Bank Syariah. Adapun kelemahan itu meliputi:

- 1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat,
- 2) Kantor yang dimiliki sedikit,
- 3) Ketidaktahuan masyarakat,
- 4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit,
- 5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat tidak diketahui masyarakat,
- 6) Kurangnya fasilitas. Selain itu, kelemahan bank syariah adalah sebagai berikut:
 - a) Jaringan kantor Bank Syariah belum luas.
 - b) SDM Bank Syariah masih sedikit.
 - c) Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang.
 - d) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada Bank Konvensional.

4. Bank Muamalat Indonesia

Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia berdiri atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992 dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, di peroleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 160 Miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat menyanggah predikat sebagai Bank Devisa.

Pengakuan ini memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an Indonesia di landa krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor Perbankan Nasional terkena dampak oleh kredit macet di segmen korporasi.

Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF)⁵⁸ mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 39,3 Miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalan. Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi.

Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari

perekrutan kepengurusan baru di mana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan tambahan dari para pemegang saham.
2. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam pemangkasan biaya tidak memotong hak kru Muamalat sedikit pun.
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru.
4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakan disiplin kerja.
5. Muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua
6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI di dukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos Online/SSOP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini telah membuka cabang di luar negeri, yaitu Kuala Lumpur Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Elektronik Payment System

(MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian dan tulisan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian Joko Tri Haryanto dan Olivia dengan judul *Theoretical Review of The Application of Green Banking in Indonesia*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi umum Indonesia secara umum memperlihatkan adanya kemungkinan perbankan untuk mengembangkan *green practices* tidak hanya pada sektor lingkungan tetapi juga pada sektor-sektor lainnya. Misalnya pada sektor sosial, perbankan Indonesia dapat mengembangkan *social housing* melalui KPR (kredit kepemilikan rumah) hijau ramah lingkungan dengan menawarkan suku bunga bank lebih rendah.²⁵
2. Penelitian Nicholas Maramis dengan judul *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia *Green Banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan pasal 8 UU perbankan yang telah diubah.²⁶
3. Penelitian Mohammad Nazim Uddin, dkk dengan judul *Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from*

²⁵Joko dan Olivia, *Theoretical Review of The Application of Green Banking in Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol. 16 Nomor 2, Juni 2014

²⁶Nicholas Maramis, *Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.4 Nomor 6, Juni 2016

Bangladesh. Hasil dari penelitian ini adalah The investigation revealed that Islamic banks had made a significant contribution to green banking that improves the environment as means of cost and energy savings, preservation of natural resources and the need to respect all living things. The study seems to carry an enormous academic value since a few studies have undertaken in this area (Studi tersebut mengungkapkan bahwa bank syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap green banking yang memperbaiki lingkungan sebagai sarana penghematan biaya dan energi, pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan untuk menghormati semua makhluk hidup. Studi ini tampaknya membawa nilai akademis yang sangat besar karena beberapa penelitian telah dilakukan di bidang ini).²⁷

4. Hasil penelitian dari Tria Ratnasari *et.al* ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank. *Green banking* dalam penelitian ini dibagi menjadi dua dimensi yakni, operasional harian green banking dan kebijakan green banking. Kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah kecukupan modal, kredit bermasalah, efisiensi bank dan tingkat likuiditas bank. Sampel pada penelitian ini adalah Perbankan Sektor Di Indonesia periode 2012-2016 dengan metode purposive sampling.. Metode analisis pada penelitian ini regresi analisis berganda. Hasil menunjukkan bahwa operasional harian *green banking*, kecukupan modal dan tingkat likuiditas bank terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank. Kebijakan green banking

²⁷Mohammad Nazim Uddin, dkk, *Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Vol. 10 (1), January 2018, h. 97

dan efisiensi bank terbukti memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank, sedangkan kredit bermasalah tidak terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas bank.²⁸

5. Hasil penelitian dari Lilik handajani, Ahmad rifai dan L.hamdani husnan bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Analisis isi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaporan aktivitas *green banking* pada laporan tahunan bank BUMN periode 2015-2017. Temuan penelitian mengungkapkan bank BUMN telah melakukan inisiasi praktik *green banking* dengan bentuk aktivitas yang beragam karena belum adanya pedoman pelaporannya dan terjadi kecenderungan pelaporan aktivitas *green banking* yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Indikator kegiatan *green banking* pada bank BUMN dapat dikelompokkan dalam domain pelaporan yang meliputi *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy*.²⁹
6. Hasil penelitian dari Md shafiqul islam dan Prahallad chandra Das yang menggambarkan praktik memanggang hijau di Negara Bangladesh. Studi terutama didasarkan pada data sekunder yang menyoroti *mobile banking*,

²⁸Tria Ratnasari, *Model Integrasi Untuk Mengukur Dampak Dari Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank*, (Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2018), h.99

²⁹Lilik Handajani, Ahmad Rifai, L.Hamdani Husnan, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN*, *Jurnal Economia*, Vol.15, No.1, (April 2016), h.1

perbankan *online*, pembiayaan hijau serta unit perbankan hijau dengan mempertimbangkan masalah lingkungan yang higienis serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).³⁰



³⁰Md.Shafiqul Islam,Prahallad Chandra Mas, *Green Banking Practices in Bangladesh*, *IOSR Journal of Business and Management*,Vol.VIII,No.3,(2013),h.39

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, Nel, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*, Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 14 No. 02 Oktober 2014
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ayu, Andi Nurul Fadhilah dan Maria Anityasari, “Analisis Implementasi Green Banking pada PT. Bank X (Persero) Tbk”, *Jurnal Teknik Pomit Vol. 1, No. 1*
- D. Atarwaman, *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon*, Jurnal Sosoq Volume 4 Nomor 2, Agustus 2015
- Damayanti, Riski, at.al. *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan Non Medis RS Islam Siti Khadijah Palembang)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan Tahun XV No 2, Oktober 2018
- Efriyanti, Farida, dkk, *Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT.Bank Negara Indonesia*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Volume 3, Nomor 2, September 2012
- Joko dan Olivia, *Theoretical Review of The Aplication of Green Banking in Indonesia*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 16 Nomor 2, Juni 2014
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Handajani, Lilik, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN*, *Jurnal Economia*, Vol. 15, No. 1 April 2019
- Maramis, Nicholas, *Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Bannking Mengenai Kebijakan Kredit*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.4 Nomor 6, Juni 2016
- Mu'thi, Rouf Ibnu, *Green Banking*, (Jakarta: Kompasiana: 2012)

- Nuraeni, Andi, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting*, JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)-Volume 4, No.1, Januari-Juni 2019
- Pramiana, Omi, dkk, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory, *Jurnal EKSIS: Volume 13 No 2, Oktober 2018*
- Setyawan, Agustinus, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Tiga Perusahaan Fabrikasi Lepas Pantai Di Batam Dan Karimun)*, Journal Of Accounting & Management Innovation, Vol.2 No.1, January 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet 2013
- Suryaman, dkk, Peran Dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green Banking (Studi Pada Bank Bjb), *Prosiding Sentia 2016 – Politeknik Negeri Malang Volume 8*.
- Uddin, Mohammad Nazim Uddin, dkk, Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Vol. 10 (1), January 2018*
- 